

Agenzi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agenzi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agenzi Perempuan Desa di Aceh
Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo
Dewi Komalasari

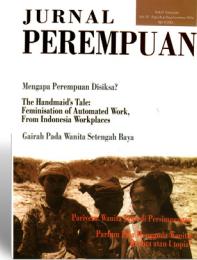
Agenzi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwadari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmor (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019



The Asia Foundation

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agenzi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agenzi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agenzi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agenzia Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkarut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "*the second sex*", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency* (2002) menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai mahluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminism. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminism pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel, 15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4 gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancara adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel, 10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Title Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan perdesaan dan keterlibatan mereka dalam pusaran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekret kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi

(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan berubah menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diajuk perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandirianya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the Association of *Eklasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok pengikut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Ekslusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Eklasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agenzia Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kait kelindan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencarian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi

¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform & ²Jurnal Perempuan

¹Jl. Taman Margasatwa Raya No.26C, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550

²Jl. Karang Pola Dalam II, No.9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

indirastuti@gmail.com, pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: Diterima 22 Oktober 2019; direvisi 11 November 2019; diputuskan diterima 30 November 2019

Abstract

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Abstrak

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyebabkan. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa (1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; (2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandirianya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Pendahuluan

Tahun 2019, bencana kebakaran masih menjadi momok bagi Indonesia. Sekitar 320 ribu hektare–atau setara dengan hampir lima kali luas daratan DKI Jakarta–hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan terbakar. Hampir seperempatnya merupakan lahan gambut (Fiantis et al. 2019). Jauh sebelum itu, kebakaran

hutan dan lahan (karhutla) terbesar yang terjadi di kawasan gambut tropis Indonesia telah terjadi pada tahun 1997 (Mongabay 2016). Kebakaran ini berlangsung berbulan-bulan sejak bulan Juli 1997 hingga Februari 1998, hingga menyebabkan kabut asap yang merupakan bencana akibat karhutla yang bersifat transnasional pertama.

Indonesia memiliki 47% dari area global lahan gambut tropis sebagian besar adalah kawasan gambut berkayu. Rawa gambut di Indonesia menutupi sebagian besar berada di dataran rendah dan di antara sungai-sungai besar (Page et.al 2011). Luas lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 14,91 juta ha yang tersebar di Indonesia, di Sumatra 6,44 juta ha (43%), di Kalimantan 4,78 juta ha (32%), dan di Pulau Papua 3,69 juta ha (25%). Meskipun demikian, kawasan gambut tropis di Indonesia, telah dikonversi menjadi pertanian, awalnya di bawah program transmigrasi Pemerintah Indonesia, tetapi sekarang telah beralih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit, khususnya di Sumatra dan Kalimantan (Osaki & Tsuji 2016, h.91).

Menurut catatan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Fraser 2019), di Kalimantan saja antara tahun 2000 hingga 2017 didapati sekitar 6,04 juta Ha hutan tua menghilang yang sekitar setengahnya dialihfungsikan menjadi perkebunan dalam jangka waktu 1 tahun setelah ditebang. Pada rentang waktu yang sama, perkebunan industri meningkat hingga 170%, yang sebagian besar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Kebakaran, pembakaran, dan alih fungsi lahan gambut yang masif merupakan penyebab degradasi ekosistem gambut yang bermuara pada isu: politik tata kelola kawasan gambut.

Persoalan tata kelola lahan gambut di Indonesia memiliki kesejarahan yang panjang, yang saling berkelindan dengan perihal politik dan ekonomi. Lahan gambut di wilayah Indonesia tercatat mulai dibuka sejak tahun 1920, pada masa kolonial Belanda, di kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. Sejak itu, bersamaan dengan dimulainya gelombang transmigrasi yang berlangsung sejak tahun 1960an pada masa Orde Lama, hingga puncaknya di masa pemerintahan Soeharto yang massif dilakukan pada awal dekade 1980an, lahan gambut mulai secara luas dialihfungsikan menjadi tanah pertanian yang dilakukan dengan mengeringkan lahan gambut. Puncak pengeringan lahan gambut dengan dibangunnya kanal-kanal besar terjadi pada tahun 1996 dengan dilaksanakannya *mega rice project* yang menyasar alih fungsi 1 juta hektar lahan gambut dan membangun ribuan kilometer kanal-kanal besar untuk mengeringkan gambut agar lahan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Namun pada akhirnya *mega rice project* tidak lagi dilanjutkan (Mongabay 2016).

Alih fungsi lahan dengan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan melalui pengeringan lahan secara ekstrem (kering tidak kembali basah) menyebabkan serasa gambut menjadi kering yang--selain melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar--menjadi bahan

bakar yang sulit dipadamkan pada musim kemarau, yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan baik karena faktor alam yang kering maupun karena perilaku manusia. Membakar lahan merupakan pola pengelolaan lahan yang biasa dilakukan di lahan gambut untuk membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum musim tanam dimulai yang dapat membersihkan lahan dengan murah dan cepat. Bagi petani, abu hasil pembakaran diyakini dapat menurunkan tingkat keasaman lahan gambut dan membuatnya menjadi lebih subur.

Pertama, alih fungsi lahan yang masif telah menyebabkan meluasnya deforestasi dan kekeringan di lahan basah/lahan gambut (Osaki & Tsuji 2016, h. 15). Dalam mengalihfungsikan gambut, pertama-tama, jutaan hektar hutan kayu endemik gambut ditebang, gelondongan kayu dibawa melalui kanal-kanal raksasa dan dijual hingga mancanegara. Kedua, tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan melalui pembakaran lahan juga berkontribusi terhadap penurunan daya dukung ekosistem gambut. Hutan gambut merupakan rumah bagi keragaman makhluk hidup dan berbagai unsur alam khas gambut di dalamnya. Hilangnya pepohonan kayu--yang menjadi rumah bagi beragam spesies, juga manusia--merupakan awal dari eksplorasi lahan gambut yang terus berlanjut hingga hari ini. Secara khusus, penurunan daya dukung atau degradasi ekosistem gambut ini juga berdampak serius terhadap perempuan.

Dalam kajian ekologi politik feminis, degradasi dan kerusakan lingkungan dipandang memiliki keterkaitan dengan persoalan politik dan ekonomi. Ekologi politik feminis melihat "politik" dan "kekuasaan" secara berbeda, yang keduanya memiliki keterkaitan erat dengan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam konteks ekonomi-politik sumber daya alam, politik degradasi lingkungan, konservasi, liberalisasi alam, dan hal ihwal akumulasi kapital (Elmhirst 2015). Tulisan ini kemudian hendak menguraikan bagaimana persoalan tata kelola lahan gambut tak berkelanjutan yang memiliki kesejarahan ekonomi-politik berdampak pada degradasi lingkungan dan pemiskinan perempuan desa gambut (baik karena hilangnya ruang hidup maupun sumber-sumber kehidupan).

Data-data dalam tulisan ini dikumpulkan bersamaan dengan implementasi program integrasi gender dan inklusi sosial dalam program Desa Peduli Gambut (DPG) oleh lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Desa Peduli Gambut merupakan kerangka program untuk melakukan intervensi pembangunan

pada desa-desa atau kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang menjadi target restorasi gambut oleh BRG. Tulisan ini memberikan ruang bagi pengalaman dan sudut pandang perempuan yang hidup di dalam desa dengan ekosistem gambut—yang secara langsung merasakan dampak dari rusaknya ruang hidup mereka di beberapa desa di wilayah dampingan Kemitraan, khususnya di provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Naskah ini berfokus pada pengalaman perempuan di desa Pangkoh Sari dan Kantan Atas, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan desa Sungai Namang di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kisah Dari Tiga Desa

Desa Pangkoh Sari dan desa Kantan Atas merupakan dua desa bekas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di wilayah Pangkoh, Kalimantan Tengah. Sebagai desa transmigrasi, mayoritas penduduk di kedua desa merupakan masyarakat transmigran yang mulai berpindah pada tahun 1980an dari berbagai wilayah di pulau Jawa. Kabupaten Pulang Pisau merupakan wilayah Kalimantan Tengah yang berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Kehidupan transmigran di lahan gambut merupakan kehidupan yang tidak mudah karena karakter alam yang sangat berbeda dengan karakter alam di pulau Jawa. Rata-rata komunitas transmigran yang pada saat ini masih bertahan di desa-desa transmigrasi merupakan masyarakat yang telah mengalami segala bentuk kerja keras untuk dapat “menundukkan” alam di lahan gambut yang basah yang tidak mudah untuk dikelola. “Penundukan” alam dilakukan dengan membuka hutan, mengolahnya agar dapat ditanami – termasuk dengan model pengeringan, dan mengalihfungsikannya menjadi lahan-lahan pertanian. Pada awal penempatan, masing-masing keluarga petani memperoleh lahan seluas 2 hektare untuk diolah dan seperempat hektare untuk tempat tinggal dan pekarangan. Para transmigran umumnya datang dalam kelompok-kelompok keluarga besar, seringkali kakak beradik yang telah berkeluarga dan orang tua mereka pindah bersama-sama dengan keluarga intinya. Dari kelompok perempuan yang ditemui dalam diskusi kelompok yang dilakukan di desa-desa ini, rata-rata keluarga datang dengan anak-anak usia sekolah sehingga akses pendidikan merupakan salah satu persoalan yang harus diselesaikan terutama di wilayah basah yang pada saat itu hanya dapat dicapai dengan *jukung* (sampan kecil).

Datang bersama-sama sebagai keluarga besar memungkinkan para transmigran untuk mengelola lahan

bersama-sama secara bergotong royong. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan di tingkat komunitas keluarga besar. Sejak awal berpindah, perempuan memegang peran produktif, reproduktif dan sosial. Dalam peran-peran produktif, perempuan terlibat sebagai tenaga kerja keluarga baik dalam pengelolaan lahan maupun dalam pengolahan hasil pasca panen. Dalam peran reproduktif, perempuan bertanggung jawab pada sebagian besar peran yang ada dalam merawat keluarga dan mengurus rumah dan pekarangan. Sementara dalam peran sosialnya, berbagai kegiatan dan ritual budaya dan agama terus dihidupi di tanah yang baru dengan perempuan mengambil peran aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan ritual dan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun demikian, meskipun perempuan terlibat secara aktif dalam pengelolaan lahan sebagai tenaga kerja keluarga, pengambilan keputusan dalam cara mengelola dan memanfaatkan lahan gambut pada saat itu masih lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga besar karena kelompok tani pada saat itu (dan hingga saat ini) didominasi oleh petani laki-laki.

Berbeda dengan desa Pangkoh Sari dan Kantan Atas, desa Sungai Namang di kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan merupakan desa di atas rawa gambut di mana masyarakat desanya sebagian besar adalah penduduk lokal yang telah bergenerasi hidup di lahan gambut. Datang dari etnis Banjar, sebagian besar masyarakat desa Sungai Namang merupakan masyarakat pesisir sungai yang hidup dengan sungai, rawa dan hutan gambut sebagai sumber-sumber penghidupan mereka. Meskipun penduduk desa juga mengelola lahan gambut menjadi lahan pertanian padi, tanaman dan binatang endemik gambut merupakan bagian dari sumber pangan masyarakat desa. Ikan rawa dan sungai merupakan sumber protein masyarakat desa dan peralatan penangkapan ikan tradisional merupakan bagian dari pengetahuan masyarakat yang terus dipelihara hingga saat ini.

Perempuan desa Sungai Namang menanggung beban kerja yang utama dalam merawat keluarga dan rumah tangga, dan tetap berperan besar dalam kerja-kerja produktif dan menjalankan peran sosial. Menganyam tanaman purun merupakan ketrampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjual hasil anyaman purun telah menjadi sumber pendapatan perempuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menganyam, pengolahan ikan hasil tangkapan di sungai dan rawa juga dilakukan perempuan dan

menjadi sumber pendapatan lain bagi keluarga. Pentingnya ekosistem gambut sebagai sumber-sumber penghidupan membuat perempuan desa Sungai Namang memiliki kepentingan yang besar dalam upaya-upaya menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Berbeda dengan kelompok perempuan transmigran di desa-desa di Kalimantan Tengah, sebagai penduduk lokal, lahan gambut yang dikelola oleh perempuan desa sebagian besar merupakan lahan warisan keluarga, yang umumnya diwariskan pada anak laki-laki dalam keluarga mengikuti hukum Islam dengan luasan yang berbeda-beda. Namun untuk mendapatkan bahan baku anyaman purun, para perempuan desa Sungai Namang memiliki akses atas lahan purun yang dimanfaatkan bersama-sama. Pada lahan bersama ini juga terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pangan masyarakat desa, yang saat ini terancam dengan menyebarluasnya tanaman gulma yang memenuhi rawa gambut desa.

Penggalian data dan cerita dilakukan dengan melalui diskusi kelompok, wawancara mendalam dan juga observasi kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kelompok perempuan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan anggota dari kelompok usaha perempuan dan kelompok wanita tani yang ada di desa-desa tersebut di atas. Pendekatan pada kelompok-kelompok ini dilakukan melalui fasilitator desa dalam program DPG yang berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok perempuan tersebut dalam kegiatan program sehari-hari. Beberapa data dalam naskah ini diambil dari dokumen Profil Desa yang merupakan bagian dari kegiatan pemetaan sosial dan spasial desa yang dilakukan dalam program Desa Peduli Gambut.

Kajian Ekologi Politik Feminis Sebagai Pintu Masuk

Beberapa literatur tentang pembangunan dan tata kelola sumber daya alam berbasis gender cenderung berfokus pada kepemilikan dan penggunaan lahan, pohon, air, hutan, dan sumber daya desa lainnya. Namun, pada kenyataannya sumber daya tersebut kerap kali berkontestasi dengan beraneka ragam variabel di level yang berbeda: laki-laki dan perempuan, rumah tangga dari kelas yang berbeda, kelompok etnis yang berbeda, pengguna lokal, nasional dan internasional.

Tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan serta dampaknya terhadap perempuan perlu dilihat melalui kajian ekologi politik feminis (*feminist political ecology*), yang menempatkan kerusakan lingkungan sebagai sesuatu yang saling berkelindan dengan

persoalan kekuasaan, ekonomi, serta penindasan berbasis gender. Ekologi politik feminis muncul sebagai sub bidang Ekologi Politik pada 1990-an, berkembang melalui studi gender dan pembangunan, yang mana hendak memahami dinamika gender dalam kaitannya dengan lingkungan, alam dan ekonomi berbasis sumber daya alam (Sundberg 2017; Elmhirst 2011).

Kajian ekologi politik feminis menawarkan kebaruan bagi studi ekologi politik, yang turut memasukkan/melibatkan dimensi gender sebagai variabel kritis/kunci yang mempengaruhi akses dan kontrol seseorang terhadap sumber daya (Rocheleau et al. 1996). Lebih dari itu, kajian ekologi politik feminis melihat kompleksitas hubungan antara kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan dan variabel lainnya—yang juga memengaruhi akses, kontrol, partisipasi, dan pengetahuan seseorang terhadap sumber daya alam (Sundberg 2017; Rocheleau et al. 1996). Hubungan antar variabel kunci tersebut membentuk atau menentukan 1) proses perubahan ekologis, 2) perjuangan laki-laki dan perempuan untuk penghidupan yang layak secara ekologis, dan 3) kemungkinan suatu komunitas untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan (Rocheleau et al. 1996, h. 4).

Argumen bahwa “akses” dan “kontrol” terhadap sumber daya telah tergenderkan berangkat dari kenyataan bahwa ada konstruksi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan dalam hal mengelola sumber daya, misalnya perempuan mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga dan komunitas. Lebih jauh, pembagian peran berbasis gender dalam mengelola sumber daya, di dalamnya juga terdapat pembagian kekuasaan berbasis gender untuk melindungi, menjaga, mengubah, membentuk, merehabilitasi, dan memulihkan lingkungan, dan untuk melakukan pengaturan terhadap satu dengan lainnya (Rocheleau et al. 1996, h. 5).

Penguasaan sumber daya alam yang tergenderkan, meliputi hak dan tanggung jawab dapat dibagi menjadi 4 domain sebagai berikut, 1) Kontrol terhadap sumber daya yang didefinisikan saat ini. 2) Akses terhadap sumber daya (*de facto* dan *de jure*, eksklusivitas akses, pembagian akses, yang utama atau sekunder), 3) Pemanfaatan atau penggunaan sumber daya berbasis gender (sebagai input, produk, aset, untuk subsisten dan untuk komersial), 4) Tanggung jawab untuk memperoleh dan atau mengelola sumber daya untuk keluarga dan komunitas (Rocheleau et al. 1996).

Bersamaan dengan pembagian hak atas sumber daya berdasarkan gender, yang penting juga untuk

diteliti adalah pembagian tanggung jawab atas sumber daya itu sendiri. Perihal ini dapat dilihat mulai dari unit rumah tangga, komunitas, hingga pada skala yang lebih besar seperti organisasi sosial. Yang paling umum dilihat adalah; 1) Tanggung jawab untuk memperoleh secara sebagian atau memproduksi hasil dari sumber daya untuk kebutuhan rumah, seperti kayu, air, susu, obat-obatan herbal di area pedesaan, 2) Tanggung jawab untuk mengelola sebagian sumber daya—misalnya melindungi mata air, merawat hutan desa, konservasi tanah di wilayah desa, menjaga taman, dll (Rocheleau et al. 1996).

Kajian ekologi politik feminis ini kemudian digunakan dalam melihat berbagai persoalan yang menyebabkan degradasi ekosistem gambut dan dampak dari kerusakan tersebut. Dengan menggunakan lensa ekologi politik feminis maka penelitian ini tidak hanya memaparkan secara deskriptif bahwa perempuan adalah korban paling rentan akibat kerusakan lahan gambut, tetapi juga memperlihatkan bagaimana politik tata kelola desa di level global, nasional, dan lokal berkait erat dengan politik kekuasaan dan ekonomi politik yang dampaknya berlapis untuk perempuan.

Politik Tata Kelola dan Degradasi Ekosistem Gambut dalam Tutur Perempuan Desa

Waktu itu, padi kami menanam sendiri, sayur tidak pernah beli, bahkan gula merah pun kami bikin sendiri. Pohon kelapa dulu banyak di sini, ditanami oleh orang tua ketika baru datang. Ikan bisa dipancing, sambil panen padi di sawah, kaki kami ditabrak ikan, banyak ikan di sawah. (Perempuan Petani, Desa Kantan Atas 2019, Wawancara 23 Agustus)

Desa Pangkoh Sari merupakan salah satu desa di kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, provinsi Kalimantan Tengah, yang sebagian besar wilayahnya memiliki tanah bergambut. Desa yang terletak di pesisir muara Sungai Kahayan yang mengalir ke laut Jawa ini memiliki luas lahan lahan gambut mencapai 858,2 Ha. Desa Pangkoh Sari merupakan merupakan desa bekas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang terbelah oleh saluran primer sepanjang lebih dari 5 kilometer. Saluran primer ini membagi desa, termasuk wilayah pemukimannya, menjadi dua wilayah di sisi kiri dan kanan saluran primer.

Warga desa usia produktif yang saat ini hidup di desa Pangkoh Sari merupakan generasi kedua keluarga transmigran yang berpindah dari berbagai wilayah di Jawa menuju Kalimantan Tengah pada kisaran tahun

1980an bersama orang tua mereka. Kehidupan di desa-desa transmigrasi di wilayah Pandih Batu, termasuk desa Pangkoh Sari tidaklah mudah karena sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas dan konektivitas di dalam desa, antar-desa dan menuju ke pusat kecamatan maupun pusat daerah masih buruk. Dalam ingatan tentang masa kanak-kanak mereka, anak-anak harus menuju ibukota kecamatan di wilayah Pangkoh untuk dapat bersekolah dengan mengendarai *jukung* atau sampan kecil.

Meskipun sekolah belum tersedia, dan banyak tantangan yang harus dihadapi, ekosistem gambut masih menjadi ruang hidup yang berkelimpahan bagi masyarakat desa transmigrasi Pangkoh Sari. Pada saat itu, warga desa mulai dengan menanam sayuran di lahan yang mereka dapatkan. Meskipun merupakan lahan gambut, lahan yang mereka dapatkan sebagai bagian dari program transmigrasi merupakan lahan yang subur. Ketika lahan diberikan pada keluarga transmigran, hutan telah dibuka untuk dipersiapkan untuk ditanam.

Dalam perkembangannya, desa Pangkoh Sari menjadi lumbung padi untuk wilayah Kalimantan Tengah pada sekitar tahun 1987. Pada saat itu tanah subur dan hasil pertanian melimpah. Lahan-lahan masyarakat belum dikeruk dengan peralatan berat sehingga lahan gambut masih basah dan subur. Hanya wilayah pemukiman yang memiliki parit-parit yang dikeruk dengan peralatan berat agar jalan-jalan menjadi kering dan pemukiman dapat dibangun. Sementara parit-parit yang ada di wilayah pertanian hanya digali secara manual menjadi parit-parit kecil. Model pertanian tumpang sari dilakukan, dengan sawah yang ditanami padi dan pematang sawah yang ditanami sayuran. Namun terdapat kendala dalam pengelolaan lahan sawah karena parit yang digali secara manual berukuran sempit sehingga pada musim hujan lebat parit tidak dapat menampung air hujan dan air menggenangi sawah mereka.

Ketika banjir terjadi, atau ketika tinggi muka air meningkat, masyarakat desa mulai mempertimbangkan cara-cara yang lebih ekstrem untuk mengatasi air yang menggenangi sawah mereka. Pada tahun 1995, melalui musyawarah desa, akhirnya diputuskan untuk menggunakan peralatan berat untuk memperbesar saluran air menjadi kanal yang cukup lebar. Keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan karakter lahan gambut dan dampak dari kanalisasi ekstrem terhadap keseluruhan ekosistem gambut. Upaya-upaya untuk mengelola lahan dengan mempertahankan kelestarian gambut belum menjadi pertimbangan. Pada saat itu pemahaman mengenai fungsi ekologis lahan gambut

yang basah bagi ekosistem pada skala kawasan juga kelebihannya sebagai penyimpan cadangan karbon belum dimiliki oleh warga desa.

Setelah kanalisasi dilakukan kondisi lahan pertanian di atas lahan gambut berubah, namun tidak seperti yang diharapkan. Wilayah lahan gambut yang dikanalisisi justru menjadi lebih-lebih sulit ditanami padi. Hal ini terjadi karena lahan gambut menjadi kering dan kandungan asam yang ada di lapisan gambut bagian bawah naik dan menyebabkan air tanah menjadi lebih asam. Dalam beberapa musim tanam, penanaman padi yang dilakukan gagal karena padi tidak dapat tumbuh.

Gagal panen menyebabkan masyarakat desa harus mencari sumber penghidupan baru. Sebagian besar sawah ditinggalkan karena penduduk desa, khususnya laki-laki, meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di tempat lain. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai buruh di luar desa.

Kondisi lahan yang tidak dapat ditanami ini sesungguhnya tidak berlangsung lama di desa Pangkoh Sari. Sekitar 2-3 tahun setelah penggalian kanal, lahan gambut menjadi kembali subur dan dapat ditanami. Sedangkan, menurut para perempuan petani, penggalian kanal membuat lahan pematang sawah menjadi lebih kering hingga dapat ditanami sayuran. Namun setelah 2 tahun berlalu, desa Pangkoh Sari sudah ditinggalkan sebagian besar petaninya, terutama petani laki-laki. Beberapa orang petani yang masih bertahan di desa kembali mulai menanam padi, namun karena hanya sebagian kecil lahan pertanian yang dapat dikelola, ditanamnya lahan gambut dengan tanaman padi justru mengundang munculnya hama yang sulit ditangani: tikus dan belalang.

Serangan hama terjadi karena budaya bertani yang pada awalnya dilakukan bersama-sama secara bergotong royong mulai menghilang ketika sawah ditinggalkan penggarapnya. Ditinggalkannya desa oleh sebagian besar laki-laki mengakibatkan banyak lahan pertanian yang kosong dan ditumbuhi semak belukar.

Sebagian petani yang masih ada di desa, yang kebanyakan merupakan petani perempuan, mencoba bertahan dengan tetap menggarap lahan sawah mereka. Namun dengan terbatasnya tenaga, sawah yang mampu digarap hanya sebagian kecil saja dari lahan pertanian yang ada. Akibatnya, hama tikus dan belalang terkonsentrasi pada lahan-lahan yang sempit dan menghabiskan sebagian besar bulir-bulir padi yang ada. Namun para petani perempuan tetap bertahan, karena bertani merupakan cara hidup mereka. Mengelola lahan

pertanian tetap dilakukan agar "ladang tetap padang (terang)" tidak ditumbuhi semak belukar.

Kendala dalam mengelola lahan pertanian memuncak ketika aturan mengenai larangan membakar lahan diterbitkan. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan besar pada tahun 2015 kemudian mendorong diterbitkannya aturan larangan membakar untuk mempersiapkan lahan, termasuk lahan pertanian. Sebagai akibat dari munculnya larangan bakar, sebagian besar lahan pertanian tidak dapat diolah karena petani meyakini bahwa membakar lahan adalah cara terbaik untuk mengelola pertanian padi di atas lahan gambut.

Seperti juga desa Pangkoh Sari, Desa Kantan Atas yang juga berada di kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, merupakan salah satu desa bekas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di wilayah Pangkoh. Desa Kantan Atas berada pada saluran kanal primer yang terhubung langsung dengan Sungai Kahayan pada bagian muaranya. Desa Kantan Atas terletak pada dataran rendah (9-15 mdpl) dan dipengaruhi oleh pasang surut sungai Kahayan dan sungai Sebangau. Sebagian besar area merupakan lahan gambut dengan kedalaman asli sedalam 1 hingga 4 meter. Namun degradasi ekosistem gambut di wilayah ini menyebabkan kedalaman gambut menyusut hingga 0,6 hingga 1 meter, karena pengeringan lahan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Degradasi dan deforestasi terbesar lahan gambut di desa Kantan Atas terjadi akibat bencana karhutla yang diperparah oleh El Nino pada tahun 1997 dan kebakaran besar berikutnya pada tahun 2003. Sejak terjadinya kebakaran, hutan dan rawa gambut desa Kantan Atas mulai beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, baik yang dimiliki perusahaan maupun kebun-kebun sawit milik warga. Karhutla besar pada tahun 2015 yang melahirkan Inpres nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dimaksudkan untuk mengatasi persoalan karhutla berulang yang terjadi hampir di setiap musim kemarau setiap tahunnya di lahan gambut. Inpres mengenai pengendalian karhutla ini diikuti dengan aturan larangan bakar di tingkat daerah yang menyebabkan pengelolaan lahan pertanian yang selama ini diolah dengan cara dibakar tidak lagi dapat dilakukan. Sebagian besar wilayah pertanian menjadi kering tak tertangani dan dipenuhi semak belukar.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2019, para perempuan petani desa Kantan Atas bercerita bahwa sudah hampir 3 tahun bekas lahan

persawahan masyarakat dibiarkan menganggur menjadi lahan tidur karena tanahnya menjadi terlalu kering dan keras untuk ditanami. Dengan sawah yang sudah lama tidak dapat ditanami, untuk mencukupi kehidupan keluarganya, laki-laki/suami dalam rumah tangga bekerja sebagai buruh - kebanyakan buruh bangunannya baik di sekitar desa ke luar daerah. Anak-anak muda yang berpendidikan merantau hingga Palangka Raya untuk bekerja. Perempuan yang masih tinggal di desa sebagian bekerja menjadi buruh di perkebunan sawit yang ada di sekitar desa.

Beberapa perempuan menceritakan tentang perubahan lingkungan hidup dan ekosistem gambut desa Kantan Atas yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat yang dialami hanya dalam satu generasi: mereka yang datang pada usia kanak-kanak menjadi saksi langsung perubahan ekosistem gambut yang semakin melemah daya dukungnya. Sebuah ingatan tentang bumi yang subur.

Saya datang bersama orang tua sekitar tahun 1982. Waktu itu saya masih kecil, masih sekolah. Desa ini dulu makmur, banyak ditanami padi dan menjadi sentra kedelai. Dulu tanahnya masih bagus, masih merah, masih tebal gambutnya. Airnya warnanya seperti teh, merah, tapi bisa diminum, belum tinggi zat asamnya. Tapi sejak dulu memang sudah dibakar, namun aman saja karena tanahnya masih basah. Ini sebelum di-*eksas* (*excavator*), ditanami padi masih bagus. Kami menanam kacang, bagus. Dulu di sini sentra kedelai sampai-sampai pak Menteri datang ke sini untuk panen raya. Tahun 1998-2000 itu puncaknya panen raya kacang kedelai dan kacang tanah, dan kami masih bisa menanam hingga tahun 2000. Sampai tahun 2000 belum ada yang keluar dari desa karena semua sibuk bertani. (Perempuan Desa Kantan Atas 2019, Wawancara 24 Agustus)

Namun, merefleksikan pengalaman mereka, para petani perempuan menyadari bahwa ada yang salah dengan sistem tata kelola gambut yang tidak mempertimbangkan kelestarian gambut di masa lalu.

Tapi setiap tahun memang lahannya dibakar untuk bisa dibersihkan, tapi lahan gambutnya masih basah. Waktu itu kami belum tahu kalau gambutnya bisa semakin tipis dan habis jika dibakar, kami nggak memperhatikan. Tau-tau sudah kering ... [penyebab pertama] sekitar tahun 2007-2008 lahan pertanian menjadi berubah adalah karena adanya usaha untuk mengeringkan lahan gambut. Dulu kan kalau ke sawah jalannya becek, jalannya rusak. Kalau mau bawa hasil panenan kan susah. Terus kelompok-kelompok itu mengusulkan [dibuat parit] biar kering [jalannya]-‘dieksa’ (baca: *excavator*). Sesudah itu, hidupnya malah kering beneran. (Petani Perempuan Desa Kantan Atas 2019, Wawancara 24 Agustus).

Mereka juga mengakui bahwa pada awal mengolah lahan gambut untuk menanam padi, tidak seperti penanaman kedelai, lahan sawah untuk pertanian padi tidak perlu dibakar, hanya perlu dibersihkan dan siap untuk ditanami padi. Penggunaan sistem pengolahan lahan pertanian dengan membakar baru mulai dilakukan ketika kanal-kanal dibuat dengan menggunakan mesin berat, yang menyebabkan lahan mengering dan kandungan asam pada lahan gambut meningkat sehingga tanaman padi sulit hidup. Pembakaran diyakini dapat menurunkan kandungan asam dengan menggunakan abu dari pembakaran.

Kekeringan juga bahkan terjadi di wilayah transmigrasi yang pada awalnya sulit untuk ditinggali karena dalamnya rawa gambut. Ketika awal datang ke wilayah Pangkoh, sebagian keluarga transmigran sempat memperoleh lokasi di wilayah yang dikategorikan sebagai rawa gambut dalam. Rumah-rumah mereka berdiri di atas rawa gambut yang basah dan lahan mereka yang selalu digenangi air hampir tidak dapat ditanami. Kelompok transmigran ini hanya bertahan satu tahun di wilayah ini dan akhirnya pindah ke wilayah desa Kantan Atas yang saat ini mereka huni. Namun saat ini, bahkan wilayah tersebut sudah menjadi kering dan berubah menjadi perkebunan sawit yang dikelola perusahaan.

Kisah di atas menggambarkan bagaimana perempuan desa Kantan Atas menyaksikan perubahan yang terjadi pada lingkungan alam sekitar mereka yang berakibat pada menurunnya daya dukung ekosistem gambut untuk menopang kehidupan di atasnya. Ingatan warga desa mengenai konteks desa yang subur yang memberi penghidupan berkecukupan bagi warga desa masih kuat terekam dalam benak perempuan. Dalam diskusi pun, para perempuan masih memandang diri mereka sebagai petani, petani yang tidak lagi bertani, petani yang harus meninggalkan lahan mereka dan bekerja sebagai buruh sawit. Ekosistem gambut yang menjadi ruang hidup mereka: perempuan, laki-laki, anak-anak dan orang dewasa, pada awalnya merupakan ekosistem yang bersahabat dan dapat memakmurkan hidup mereka. Desa mereka pada awalnya adalah sentra pertanian padi dan kedelai dan bahkan begitu terkenal hingga pejabat setingkat menteri pun datang untuk menyaksikan kemakmuran hidup sebagai transmigran di tanah yang baru.

Perubahan ekosistem gambut disadari oleh kelompok perempuan Desa Kantan Atas merupakan dampak dari pengambilan keputusan yang buruk yang tidak disertai dengan pemahaman tentang karakteristik ekosistem gambut. Dalam kisah di atas, perempuan petani desa

Kantan Atas menunjukkan pemahaman mendasar tentang prinsip tata kelola gambut yang seharusnya diterapkan: pentingnya memperhatikan kandungan air di lahan gambut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Air gambut menjadi kunci dari kesuburan lahan gambut dan tata kelola gambut yang paling buruk terjadi ketika kandungan air di lahan gambut berkurang dalam waktu cepat dan tidak kembali lagi.

Menurut para perempuan petani, dua kesalahan pengelolaan lahan yang telah dilakukan di desa Kantan Atas adalah dikeringkannya lahan gambut dengan pembuatan kanal-kanal menggunakan alat berat dan pembakaran berulang-ulang yang dilakukan untuk ‘mengubah’ lahan basah gambut menjadi lahan ‘kering’ yang dapat ditanami. Perempuan desa Kantan Atas pada umumnya telah menyadari bahwa pembakaran yang dilakukan berulang menyebabkan habisnya lapisan gambut yang pada akhirnya hanya menyisakan tanah liat yang keras dan tidak lagi dapat ditanami.

Kerentanan Hidup Perempuan Akibat Degradasi Ekosistem Gambut

Degradasi ekosistem gambut akibat alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif dan tak berkelanjutan secara langsung berakibat pada kelestarian lingkungan yang menunjang penghidupan dan kehidupan makhluk di dalamnya. Menghilangnya keragaman flora dan fauna berakibat langsung pada menurunnya sumber penghidupan masyarakat dan sumber pangan yang dapat diperoleh perempuan untuk menjaga keberlanjutan hidup keluarga. Perempuan harus pergi lebih jauh untuk memperoleh pangan dan bekerja lebih keras untuk memperoleh upah agar dapat membeli bahan-bahan yang sebelumnya tersedia secara cuma-cuma dari alam untuk keluarga mereka.

Buku Profil Desa Kantan Atas yang diterbitkan pada tahun 2019 mencatat bahwa sungai dan rawa gambut desa Kantan Atas merupakan sumber protein nabati fauna khas gambut, seperti ikan gabus, betok, sepat, dan tapa. Dengan mengeringnya rawa gambut, berbagai jenis ikan tersebut tidak lagi mudah didapatkan, sehingga kebutuhan protein keluarga menjadi tidak mudah untuk dipenuhi. Perempuan harus pergi lebih jauh untuk dapat memperoleh ikan, bahkan harus membeli sehingga kebutuhan akan uang tunai meningkat. Selain fauna khas gambut yang dikonsumsi, berbagai jenis fauna liar yang merupakan bagian penting dalam mata rantai kehidupan ekosistem gambut pun mulai menghilang. Dalam Profil Desa yang sama disebutkan bahwa jenis-

jenis binatang liar seperti rusa, beruang saat ini hampir tidak pernah ditemui, sementara babi hutan dan monyet masih ada, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit, dan menjadi ancaman bagi kebun-kebun warga karena menyusutnya hutan tempat mereka hidup. Hilangnya berbagai jenis fauna terjadi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun.

Berbagai flora khas gambut pun menghilang bersamaan dengan menghilangnya gambut. Pohon kayu galam, tanaman endemik gambut, yang dalam ingatan masyarakat desa Kantan Atas pada awal tahun 2000an masih ada di hampir seluruh wilayah desa, dalam tahun-tahun terakhir hanya tersisa di sekitar 15 persen wilayah desa saja. Beberapa jenis pepohonan lain bahkan menghilang, seperti tumih, pantung dan jelutung raya. Tanaman khas gambut yang masih bertahan adalah jenis pakis/ kelakai yang menjadi bahan pangan masyarakat desa, namun itupun tidak tersedia di banyak wilayah desa seperti ketika ekosistem gambut masih baik.

Hilangnya hutan digantikan oleh perkebunan monokultur: karet, sawit dan sengon. Pemilihan tanaman karet, sawit dan sengon dianggap lebih menarik karena adanya permintaan pasar dan (ketika perkebunan baru dibuka) harga komoditas karet dan sawit cukup tinggi. Namun, kondisi ini tidak bertahan karena harga karet dan sawit semakin rendah dari waktu ke waktu sehingga pada akhirnya pendapatan dari karet ataupun sawit tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terutama ketika tanaman pangan tidak lagi dapat ditanam di kebun-kebun milik masyarakat. Tanaman pangan merupakan komoditas yang penting bagi perempuan, yang bertanggung jawab pada keberlangsungan hidup keluarga, namun tanaman pangan umumnya merupakan jenis tanaman yang rentan terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup. Sebagai contoh, di desa Kantan Atas, wilayah transmigrasi yang dikelola masyarakat desa pada awalnya hampir seluruhnya dapat ditanami sayuran pada awal tahun 2000-an, namun berkurang hingga hanya sekitar separuhnya antara tahun 2004 hingga 2010, dan hanya tersisa sangat sedikit pada tahun 2011 ke atas. Hal yang sama terjadi pada jagung, kedelai dan kacang tanah. Kedelai pada saat ini hampir tidak ada lagi di desa Kantan Atas yang pada masa kejayaannya merupakan sentra kedelai.

Di Kalimantan Selatan, khususnya di desa Sungai Namang, kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara, perubahan ekosistem gambut berpengaruh secara langsung terhadap sumber-sumber penghidupan perempuan desa dengan cara yang berbeda. Desa yang terletak di dataran rendah

rawa lebak di tepian sungai Nagara ini merupakan desa yang sebagian wilayah pemukimannya terletak di atas rawa gambut, yang ditumbuhi teratai dan purun. Teratai adalah sumber pangan, sementara purun merupakan bahan baku anyaman tikar dan bakul yang menjadi sumber pendapatan perempuan desa Sungai Namang. Berkembangnya perkebunan sawit di sekitar desa yang membawa masuknya gulma baru, yaitu tanaman *susunan gunung* membuat wilayah rawa gambut di desa Sungai Namang menjadi tidak lagi produktif.

Gulma ‘susunan gunung’ dengan cepat berkembang dan mendesak ruang hidup tanaman endemik rawa gambut Sungai Namang. Tidak hanya di wilayah hidup purun dan teratai, susunan gunung juga menutupi lahan-lahan pertanian masyarakat desa hingga sebagian besar lahan tidak lagi dapat ditanami padi. Susunan gunung (*Mimosa pigra* L.) merupakan tanaman perdu sejenis tanaman putri malu namun memiliki batang tanaman yang keras sehingga sulit dibersihkan. Akar susunan gunung yang memenuhi rawa juga mengambil ruang hidup ikan-ikan khas rawa gambut yang menjadi sumber pangan masyarakat desa, sehingga hasil tangkapan masyarakat desa pun berkurang. Membersihkan lahan gambut dari susunan gunung membutuhkan biaya besar karena harus menggunakan alat berat, sementara sebagian besar pemilik alat berat adalah pemilik perkebunan sawit. Dengan demikian, tanah-tanah milik masyarakat desa yang tidak terkelola sangat rentan diambil alih oleh pengusaha bermodal besar untuk dikonversi menjadi perkebunan.

Menganyam purun merupakan sumber penghidupan utama di banyak desa di lahan gambut Kalimantan Selatan yang ketrampilannya masih dilestarikan hingga saat ini. Hampir seluruh rantai usaha rumahan anyaman purun didominasi oleh perempuan: mulai dari mencari bahan baku, menjemur, mewarnai, menganyam, menjahit, hingga menjual di pasar-pasar kerajinan. Meskipun seringkali tidak dipandang sebagai sumber penghidupan yang bernilai tinggi - karena jumlah uang yang diterima langsung habis untuk mencukupi kebutuhan mingguan keluarga - tanpa anyaman purun, kehidupan sehari-hari keluarga di wilayah perdesaan Sungai Namang, juga desa-desa anyaman purun sekitarnya, akan menjadi sangat sulit. Terlebih ketika lahan pertanian tidak lagi dapat ditanami karena didesak gulma susunan gunung dan rawa gambut tidak lagi memberikan hasil ikan yang melimpah. Semakin sempitnya lahan purun yang ada di desa menyebabkan masyarakat desa harus mulai membeli bahan baku purun dari pedagang purun dari luar desa dan menyebabkan biaya produksi anyaman

meningkat, sementara harga anyaman purun tetap rendah.

Perempuan dan Pemenuhan Kebutuhan Air: Hidup Kekeringan di Lahan Basah

Menurunnya kualitas lahan gambut berpengaruh langsung pada kemampuan serasah gambut untuk menyerap air pada musim hujan dan melepaskan cadangan air pada musim kemarau. Akibatnya cadangan air yang dapat dikonsumsi masyarakat desa menjadi sangat berkurang.

Di desa Kantan Atas, sebelum kanal-kanal digali dengan menggunakan *excavator*, warga desa hanya perlu menggunakan cangkul untuk menggali kolam yang tidak terlalu dalam pada lahan gambut untuk mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Sumur bor tidak dibutuhkan karena air dapat diperoleh dengan mudah. Meskipun air gambut berwarna merah dan tidak bening layaknya air di tanah mineral, namun sebelum terjadinya degradasi ekosistem gambut, air gambut diyakini para petani perempuan dapat dikonsumsi. Di desa-desa yang dikelilingi perkebunan sawit, seperti desa Sungai Namang dan desa Kantan Atas, ketersediaan air menjadi semakin sedikit dengan meluasnya lahan perkebunan sawit.

Saat ini, untuk kebutuhan selain konsumsi memasak dan minum, perempuan desa memperoleh air dari sumur bor yang harus digali dalam, namun air yang didapatkan cenderung asin, kekuningan dan meninggalkan noda kuning pada pakaian. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, pada musim hujan masyarakat desa dapat menampung air hujan pada drum-drum milik pribadi mereka, namun pada musim kering mereka harus membeli air galon yang merupakan air sungai yang dijernihkan oleh industri galon rumahan yang ada di sekitar wilayah desa mereka. Kenangan akan sumber air yang berkelimpahan dan kesedihan yang memuncak bersamaan dengan menyusutnya air dari lahan gambut masih terbayang kuat dalam benak perempuan petani

Dulu di samping-samping rumah kami ada parit-parit kecil, banyak sekali airnya. Memang warnanya merah, tapi bisa diminum. Ikan juga banyak. Sekarang di parit besar saja nggak ada airnya. Sementara kalau musim hujan, paritnya ada airnya tetapi [mengandung] zat asam. Kemarau panjang paritnya kering, begitu hujan nanti airnya naik tapi zat asam di dalam tanahnya pun ikut naik. Airnya nggak bisa dipakai. Katak saja mati kalau masuk. Rumput-rumput pun mati. Jadi kami harus membeli air galon untuk minum atau menampung air hujan. Membeli air galon, bisa seharga 10.000 segalon, 1 galon habis dalam 3 hari, sehingga sebulan kami butuh paling nggak 10 galon. Air

itu dipakai untuk minum dan masak. (Perempuan Petani Desa Kantan Atas 2019, Wawancara 24 Agustus)

Langkanya air merupakan persoalan yang sangat penting yang membuat perempuan sulit menjalankan perannya di ranah domestik. Untuk perempuan, kehidupan mereka saat ini menjadi sulit karena apapun membutuhkan uang, sementara tanah mereka tidak lagi memberikan hasil yang dapat dijual. Akibatnya tidak ada pilihan kecuali bekerja menjadi buruh dan membiarkan suami dan anak-anak yang sudah cukup umur untuk merantau ke luar desa untuk memperoleh penghasilan. Meskipun saat ini sebagian dari mereka memiliki kebun karet harga karet yang rendah tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Di musim hujan kondisi kehidupan mereka sedikit lebih baik karena air dapat diperoleh dari penampungan air hujan, dan sebagian perempuan masih memiliki lahan yang dapat digunakan untuk menanam sayur meskipun dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Namun, perubahan iklim yang membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan menjadi lebih pendek, seperti yang dialami pada tahun 2019 ini, membuat para perempuan petani desa Kantan Atas hanya memiliki waktu musim hujan yang pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Sulitnya memperoleh air bersih tidak hanya berpengaruh pada kerja perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun juga berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan. Tidak seperti laki-laki, perempuan membutuhkan lebih banyak air – bersih – untuk merawat organ reproduksinya. Buruknya kualitas air, yang disertai dengan buruknya sanitasi rumah tangga, dapat membawa dampak buruk bagi organ reproduksi perempuan dalam jangka pendek dan panjang.

Dari Petani Menjadi Buruh: Pemiskinan Perempuan dan Hilangnya Kemandirian

Ketika lahan pertanian sulit ditanami, bersamaan dengan semakin meluasnya perkebunan yang dikelola perusahaan, terutama perkebunan sawit, bekerja menjadi buruh merupakan pilihan yang dapat segera diambil untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Di desa Kantan Atas, Kalimantan Tengah, misalnya, sulitnya kehidupan sebagai petani dan beralih fungsinya lahan gambut menjadi perkebunan sawit mendorong para perempuan petani desa Kantan Atas beralih menjadi buruh harian lepas (BHL) ataupun buruh borongan pada perkebunan sawit perusahaan ('*kerja sawitan*').

Perempuan merupakan tenaga kerja yang penting pada perkebunan sawit yang memiliki tugas-tugas yang spesifik yang digenderkan.

Buruh perempuan di perkebunan sawit, baik dengan sistem BHL maupun borongan, biasanya terlibat dalam proses pembibitan tanaman dan pemeliharaan sawit yang baru ditanam. Pekerjaan yang dianggap memiliki karakteristik utama 'merawat' ini dianggap sebagai peran yang sesuai untuk buruh perempuan. Buruh perempuan biasanya diminta untuk merawat bibit, memupuk dan membersihkan rumput di antara tanaman sawit yang masih kecil agar sawit dapat tumbuh dengan baik. Pekerjaan ini biasanya berlangsung hingga 5 tahun pertama masa penanaman sawit.

Ketika sawit mulai berbuah, laki-laki mengambil lebih banyak peran terutama untuk '*mendodos*' (mengambil dengan galah berarit panjang) buah sawit dan mengangkat sawit, sementara perempuan tetap mengerjakan pembersihan, pemupukan dan pemberian pestisida di kebun serta memunguti *brondolan* sawit yang gugur ketika dipanen.

Kerja mengumpulkan *brondolan* sawit sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang ringan jika dibandingkan dengan *mendodos*, padahal para buruh perempuan harus menunduk sepanjang hari, mengumpulkan hingga 1 *kandi brondolan* (setara dengan 3-4 ember ukuran sedang) yang digendong pada punggung mereka. Pekerjaan memunguti *brondolan* sawit di perkebunan sawit Kantan Atas pada awalnya dibayar harian sebesar Rp.50.000,- namun kemudian berubah menjadi kerja borongan dengan upah sebesar 300 rupiah setiap kilogram-nya. Besarnya upah yang mereka dapatkan akan sangat tergantung pada berapa lama mereka bekerja dan berapa banyak yang mereka kumpulkan, dan hasilnya tidak selalu sama dari musim ke musim.

Sistem borongan memaksa buruh bekerja dengan modal peralatan sendiri dan tanpa perlindungan dari perusahaan. Segala bentuk risiko ditanggung sendiri oleh pekerja harian lepas ataupun buruh borongan, baik terkait risiko kecelakaan kerja dalam jangka pendek maupun risiko kesehatan dalam jangka panjang karena penggunaan bahan kimia dalam pestisida, pupuk, maupun karena terendam dalam air gambut selama berjam-jam untuk dapat melakukan pemupukan dan pemberian pestisida.

Sementara itu, uang 50 ribu rupiah per hari yang dihasilkan dari kerja keras perempuan sebagai buruh tidak membuat kehidupan perempuan menjadi lebih

baik. Uang 50 ribu rupiah habis untuk jajan anak-anak (sekitar 10-20ribu perharinya) dan sisanya untuk membeli beras dan lauk pauk karena tanah mereka sudah tidak lagi subur. Seringkali penghasilan ini tidak mencukupi. 'Pak-pok' adalah istilah yang digunakan oleh para perempuan petani untuk menggambarkan kehidupan rumah tangga mereka yang penuh dengan 'tambal sulam' untuk membayar hutang untuk mencukupi kebutuhan.

Meskipun sawit merupakan sumber penghidupan alternatif setelah lahan mereka tidak lagi subur, perempuan desa Kantan Atas menyadari bahwa sawit juga mendorong degradasi ekosistem gambut menjadi lebih parah, dan semakin menjauahkan perempuan dari alam yang selama ini memberikan penghidupan.

Sawit sendiri ada pengaruhnya [ke lingkungan]. Tanahnya menjadi terlalu kering. Apalagi begitu kebun plasma di Pangkoh 2 itu dibuka, semakin kering lagi tanahnya. Terlalu banyak parit-parit, kan berapa pohon dikasih parit, jadi tanahnya kering semua. Saya sering menanam sayur, kalau di sebelah Pangkoh 2 itu gak akan jadi. (Ibu Siti, Petani Perempuan Desa Kantan Atas 2019, Wawancara 24 Agustus)

Pengetahuan perempuan tentang bagaimana kehadiran sawit justru berdampak pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat lahir dari kesejarahan yang panjang dan peran-peran gender yang kerap kali dilekatkan kepada perempuan. Petani perempuan menyadari betul bahwa selama ini mereka bergantung hidup dengan kualitas lingkungan lahan gambut, mulai dari air, tanah, hingga udara (jika terjadi kebakaran). Seperti yang diungkapkan Rocheleau et al. (1996) bahwa peran dan tanggung jawab terhadap lingkungan kemudian tidak hanya menentukan akses dan kontrol seseorang terhadap sumber daya tetapi juga pengetahuan yang berbeda tentang sumber daya.

Migrasi Sementara Laki-laki dan Bergesernya Tatanan Gender di Ruang Privat

Ketika sumber-sumber penghidupan di desa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena degradasi ekosistem gambut, karhutla yang terjadi hampir setiap tahun dan adanya larangan membakar untuk menyiapkan lahan pertanian membuat penduduk desa mulai bergerak meninggalkan desa untuk menjadi buruh bangunan atau bekerja di tambang. Anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, yang telah menamatkan pendidikan dasar atau pendidikan menengah pertama dan dianggap telah siap bekerja pun didorong untuk meninggalkan bangku sekolah untuk menjadi buruh berupah. Desa-desa, seperti desa Pangkoh Sari atau

Kantan Atas, lebih banyak dihuni perempuan dan anak-anak karena laki-laki dalam keluarga melakukan migrasi sementara.

Migrasi sementara ini dapat memberikan hasil yang mencukupi kebutuhan keluarga masyarakat desa. Namun perginya laki-laki dari desa membawa implikasi lain ketika keluarga menjadi terpecah dan perempuan harus mengambil peran utama untuk mengelola rumah tangga dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Dalam beberapa kasus bahkan migrasi menjadi persoalan besar karena pada akhirnya terjadi perpisahan permanen antara suami dan istri, misalnya ketika perempuan menolak untuk diajak bermigrasi atau perempuan ditinggalkan begitu saja tanpa kabar berita.

Perempuan desa Pangkoh Sari, misalnya, mengambil alih peran sebagai kepala keluarga selama laki-laki dan anggota keluarga dewasa meninggalkan desa untuk mendapatkan penghidupan. Tatanan gender dalam masyarakat desa Pangkoh Sari pun bergeser, dengan perempuan mengambil alih hampir semua peran orang dewasa di dalam rumah tangga. Apa yang langsung dirasakan perempuan adalah bertambahnya beban kerja karena segala hal harus ditanganinya sendiri.

Sementara itu di desa Kantan Atas, dengan berkembangnya perkebunan sawit di sekitar wilayah desa, sebagian perempuan akhirnya memilih untuk bekerja sebagai buruh sawit. Namun tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk laki-laki di perkebunan sawit. Akibatnya sebagian besar laki-laki dan orang muda di desa harus pergi ke luar desa untuk mencari penghidupan. Sebagian laki-laki bekerja 'emasan' (menjadi buruh atau pekerja di tambang emas, yang umumnya merupakan pertambangan tradisional skala kecil). Dengan banyaknya kaum laki-laki yang bekerja ke luar dari desa, perempuan desa Kantan Atas harus hidup sendiri untuk mengurus rumah dan anak-anak, mengurus kebun yang masih ada dan mencari pakan ternak. Perempuan desa harus hidup sendiri, atau bersama anak-anak yang masih kecil, dan menjadi perempuan kepala keluarga.

Apakah dengan ditinggalkannya desa oleh penduduk laki-laki maka kepemimpinan perempuan di ranah privat kemudian dapat diperluas dan masuk ke ranah publik? Apakah perempuan kemudian dapat memperoleh posisi dan peran signifikan dalam pengambilan keputusan praktis dan strategis di tingkat komunitas maupun desa? Ini masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan memiliki peran penting di desa, terlepas dari apakah laki-laki pergi meninggalkan desa ataupun tidak. Namun perginya kaum laki-laki dari desa untuk mencari penghidupan

di luar desa meningkatkan urgensi dilibatkannya perempuan di dalam ruang publik, terkait perencanaan pembangunan dan pengambilan berbagai keputusan strategis yang dilakukan di tingkat komunitas maupun desa. Pendidikan bagi perempuan untuk membangun kesadaran kritis tentang konteks hidup masyarakat desa dari perspektif perempuan, juga dibukanya ruang-ruang aman bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya, penting untuk dilakukan agar perempuan juga dapat terlibat aktif perencanaan pembangunan desa.

Hambatan bagi keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa disebabkan oleh beberapa faktor. Paradigma yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki membuat masyarakat, tidak hanya laki-laki namun juga perempuan, berpandangan bahwa laki-laki dapat mewakili sudut pandang dan kepentingan perempuan, sehingga kehadiran perempuan dapat diwakilkan oleh laki-laki. Rendahnya kepercayaan diri perempuan - karena tertutupnya akses untuk pengembangan diri, baik melalui pendidikan formal maupun informal - membuat perempuan enggan hadir jika diundang. Perempuan cenderung merasa pandangannya ‘tidak pantas’ untuk diungkapkan, karena merasa kemampuan dan pengetahuannya terbatas. Pertemuan-pertemuan di desa umumnya menggunakan kosakata yang sulit dipahami, terutama bagi kelompok perempuan yang tidak terbiasa dengan tata krama yang digunakan dalam pertemuan resmi, membuat perempuan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri.

Namun, perempuan secara reguler telah hadir di ruang publik, seperti kegiatan pengajian, kegiatan kerja bersama atau gotong royong di desa. Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, forum-forum seperti ini dapat digunakan untuk mulai mendidik perempuan untuk mengungkapkan pandangan mereka. Selain itu, menciptakan ruang-ruang aman bagi perempuan sangat penting untuk dilakukan. Ruang aman dapat diciptakan dengan mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok yang sama/sejenis (di antara perempuan) pada tempat dan waktu yang disesuaikan dengan waktu yang mereka miliki. Kunjungan dari ke rumah juga dapat menjadi jalan untuk membangun keterbukaan.

Menilik Posisi Perempuan Desa Gambut dalam Model Pembangunan yang Mengeksploitasi Alam

Kisah-kisah di atas menggambarkan pengalaman perempuan desa yang terjebak dalam arus pembangunan yang mengambil sebanyak-banyaknya dari alam. Tanpa memahami karakteristik gambut dan mengedepankan peran gambut dalam siklus alam, model pembangunan yang dilakukan dengan mengubah sifat-sifat alami gambut selama berpuluhan tahun telah mendesak ruang hidup, tidak hanya flora dan fauna khas gambut, namun juga manusia yang mencoba bertahan hidup di atasnya. Alam yang berkelimpahan secara bertahap, dan dalam waktu yang relatif singkat, “dikeringkan” agar dapat memberikan manfaat dengan cara-cara yang ditentukan manusia.

Gerakan pembangunan yang pada awalnya seolah-olah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan, perempuan dan laki-laki, pada akhirnya justru menimbulkan persoalan besar dan memiskinkan masyarakatnya. Peningkatan pendapatan, sebagai satu-satunya tujuan yang dianggap layak dalam memperbaiki kehidupan manusia, terus digenjot tanpa memperhatikan kepentingan manusia dan unsur-unsur alam lainnya. Tujuan dan kemudahan yang ingin diraih dalam jangka pendek mengalahkan keberlanjutan ekosistem gambut dalam jangka panjang. Pengeringan lahan gambut dengan sistem kanalisasi, seperti digambarkan di atas, tanpa pemahaman mengenai karakter gambut, telah meninggalkan persoalan besar yang hingga saat ini belum dapat ditangani dengan baik, termasuk kekeringan dan persoalan karhutla menyertainya, ditinggalkannya lahan-lahan yang awalnya subur dan dilepaskan emisi gas rumah kaca yang mendorong percepatan perubahan iklim.

Kajian ekologi politik feminis merasa perlu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci; siapa yang memiliki kontrol atas lahan? Siapa yang mengakses lahan? Siapa yang paling dirugikan dari rusaknya lahan? Dengan kajian ekologi politik feminis kemudian kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lensa ekologi politik dan gender, serta menunjukkan bahwa politik tata kelola desa di level global, nasional, lokal membawa dampak berlapis bagi perempuan mulai dari persoalan hak-hak hidup dasar (air dan pangan), persoalan alih profesi, hingga persoalan politik identitas sebagai kepala keluarga saat laki-laki memilih keluar dari desa.

Tabel 1. Analisis Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut

Politik Tata Kelola Yang Menyebabkan Degradasi Ekosistem Gambut	Peran Perempuan dan Laki-Laki Sebelum Degradasi Ekosistem Gambut	Dampak Degradasi Ekosistem Gambut Kepada Laki-Laki dan Perempuan
Gelombang Pertama - 1980an <ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi penduduk menuju kawasan gambut dengan membangun identitas sebagai sebuah desa bercorak pertanian. • Proyek Sejuta Hektar Lahan Gambut (<i>Mega Rice Project</i> - pembukaan lahan gambut untuk pertanian desa transmigran) yang tidak disertai dengan pengetahuan lingkungan lahan gambut baik di level pengambil kebijakan maupun masyarakat. • Praktik membuka lahan dengan cara membakar sebagai sebuah budaya pertanian di kawasan gambut yang berdampak pada menurunnya lapisan ketebalan gambut, kekeringan, hingga kebakaran. 	<p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pertanian bersama-sama dengan petani laki-laki 2. Menganyam Purun untuk meningkatkan ekonomi keluarga 3. Penyedia pangan keluarga (air dan makanan). <p>Laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pertanian bersama-sama dengan petani perempuan. 2. Pengambil keputusan dalam keluarga. 	<p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian pangan tidak lagi dapat dilakukan karena lahan gambut menjadi kering atau memiliki kandungan asam yang tinggi dan adanya larangan membakar – terjadi kerentanan pangan yang menyulitkan perempuan untuk memperoleh pangan untuk keluarga. 2. Perempuan sulit mengakses air bersih untuk kebutuhan keluarga dan kesehatan reproduksi perempuan. 3. Perempuan sulit memenuhi kebutuhan pangan keluarga karena ikan sulit didapatkan di rawa gambut dan tanaman pangan tidak dapat tumbuh. 4. Tanaman purun yang digunakan perempuan untuk bahan dasar anyaman semakin sulit didapatkan. 5. Perempuan beralih profesi menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit. 6. Ketika laki-laki banyak keluar dari desa, maka perempuan harus mengambil alih peran laki-laki dalam keluarga, termasuk berbagai keputusan penting dalam keluarga. <p>Laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian pangan tidak lagi dapat dilakukan karena lahan gambut kering atau memiliki kandungan asam yang tinggi dan adanya larangan membakar sehingga laki-laki melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber penghidupan lainnya. 2. Laki-laki beralih profesi menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit.
Gelombang Kedua - puncaknya pada tahun 2000an <p>Masuknya Industri Kelapa Sawit ke Desa Gambut sebagai wujud dan/atau bukti bahwa globalisasi ekonomi tidak hanya bekerja di kawasan perkotaan tetapi juga perdesaan.</p>		

Sumber: diolah dari data penelitian oleh penulis.

Tabel 1 di atas menjelaskan bagaimana politik tata kelola kawasan gambut berdampak secara berbeda bagi perempuan dan laki-laki, serta menggambarkan bagaimana persoalan yang dihadapi masyarakat di desa gambut terbentuk melalui sejarah ekonomi politik yang panjang. Hal ini juga menjelaskan bahwa desa sebagai sebuah entitas tidaklah ajeg/ tunggal, ia dipengaruhi oleh berbagai konteks ekonomi politik,

struktur lingkungan/ tanah, serta masyarakatnya. Yang semuanya saling berkelindan dengan persoalan kelas, ras, gender, etnisitas. Misalnya bagaimana keputusan tentang pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat desa telah diketahui perempuan desa sebagai praktik yang salah, namun mereka tidak memiliki kontrol (karena ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan) atas keputusan-keputusan politik terkait lingkungan. Padahal

perempuanlah yang sehari-hari berinteraksi dengan alam.

Relasi kuasa dalam soal sumber daya, penting untuk melihat relasi seseorang dengan sumber daya apakah sebagai pengguna, pemilik, atau pengelola atau relasi konflik dll. Relasi kuasa ini kemudian mempengaruhi bagaimana kepemilikan sumber daya oleh suatu komunitas dan bagaimana tipe lingkungan tersebut (Rocheleau et al. 1996, h.8).

Kedekatan perempuan dengan alam memperhitungkan berbagai unsur alam, tidak hanya yang secara langsung memberikan manfaat bagi, namun memiliki peran dalam menjaga alam. Pengamatan perempuan akan apa yang terjadi dalam perubahan ekosistem gambut, seperti digambarkan di atas, menunjukkan ketajaman karena perempuan sehari-hari mengikuti perubahan alam: mengeruhnya air, menguningnya daun padi, tidak tumbuhnya sayur mayur yang ditanam, menghilangnya purun dan pandan, juga tanaman obat yang banyak digunakan perempuan. Penjelajahan perempuan untuk mencari penghidupan bagi keluarganya di berbagai wilayah di kawasan hidrologis gambut merupakan sumber pengetahuan penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam upaya pengembangan desa.

Perempuan desa, dalam struktur masyarakat perdesaan yang patriarkal, mengalami pukulan yang terberat ketika ruang-ruang hidup perempuan diambil alih dan dikonversi secara membabi buta. Investasi yang dilakukan untuk mengubah permukaan gambut agar dapat dikendalikan dengan cara-cara yang tidak ramah gambut, telah membuat perempuan kehilangan sumber-sumber pangan yang penting untuk keluarganya, dan membuat perempuan menjadi lebih miskin karena keragaman sumber penghidupan tergantikan oleh model perkebunan *cash-crop* monokultur yang melemahkan kemandirian perempuan.

Penutup

Perempuan dan laki-laki di wilayah perdesaan gambut berinteraksi dengan lahan gambut dengan cara yang berbeda karena memiliki akses dan kontrol yang berbeda terhadap sistem ekologi yang diterapkan, sebagai dampak dari peran-peran sosial dan budaya yang tergenderkan. Mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam peran dan posisi yang dapat diambil perempuan dalam mengelola sistem ekologi di wilayah perdesaan gambut akan dapat mendorong transformasi dalam tata kelola gambut yang lebih lestari.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong tercapainya kesetaraan gender untuk transformasi tata kelola gambut yang lebih lestari. Yang pertama adalah dengan mempertimbangkan pengetahuan perempuan dalam menentukan tata kelola lahan gambut. Kemampuan perempuan untuk bertahan di alam berbeda dengan laki-laki karena perempuan tidak memusatkan eksplorasi alam untuk menghasilkan uang namun memandang alam sebagai sumber penghidupannya dalam arti yang lebih luas: air dan berbagai bahan pangan dan bahan baku kerajinan yang dikelola mengikuti ritme alam dan iklim.

Kedua, akses atas sumber daya yang ada di dalam ekosistem gambut dapat dibedakan berdasarkan gender. Perbedaan akses ini juga terjadi dalam kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan untuk menentukan sistem tata kelola dan tata kuasa ekosistem gambut yang ada di wilayah perdesaan maupun kawasan hidrologis gambut. Dalam budaya yang dominan, hak kepemilikan dan penguasaan lahan pribadi, maupun lahan bersama, dipegang oleh laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga. Namun ketika ekosistem gambut rusak daya dukung gambut sebagai ruang hidup masyarakat desa melemah, banyak laki-laki harus meninggalkan desa untuk mencari sumber penghidupan baru. Perempuan kemudian menjadi ‘kepala keluarga’ yang bertahan di desa. Maka pengambilan keputusan dikuasai oleh kelompok elit desa tanpa pelibatan perempuan dapat meninggalkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa yang diwakili oleh kaum perempuan tersebut.

Pembukaan akses bagi perempuan atas sumber daya yang ada di desa, juga memberikan tanggung jawab pada perempuan untuk turut menentukan tata kelola ekosistem gambut. Melalui akses ini maka kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya dapat diperhitungkan. Dalam pengalaman perempuan penganyam purun, jika akses atas lahan bersama desa diberikan bagi kelompok-kelompok perempuan penganyam purun, maka keberlanjutan sumber penghidupan perempuan dan masyarakat desa, sekaligus kualitas ekosistem gambut pun akan terjaga. Memberikan kelompok perempuan penganyam akses atas lahan-lahan yang dikelola desa merupakan awal dari transformasi desa untuk pengelolaan lahan yang lebih ramah gambut, karena purun hanya dapat hidup dalam ekosistem gambut yang terjaga.

Daftar Pustaka

- BRG 2019, *Profil Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah*, diakses pada 1 Agustus 2019, <https://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FIX-Kalteng-Pulang-Pisau-Pandih-Batu-Desa-Kantan-Atas.pdf>
- Elmhirst, R 2011, Introducing New Feminist Political Ecologies. *Geoforum* 42(2):129-132.
- Fiantis et al. 2019, *Tidak Cukup Restorasi Gambut Untuk Mencegah Kebakaran Hutan Berulang di Sumatra dan Kalimantan*, diakses pada <http://theconversation.com/tidak-cukup-restorasi-gambut-untuk-mencegah-kebakaran-hutan-berulang-di-sumatra-dan-kalimantan-124110>
- Fraser, B 2019, *Apakah laju deforestasi di pulau Kalimantan melambat?* Diakses pada 30 Agustus 2019, <https://forestsnews.cifor.org/59433/apakah-laju-deforestasi-di-pulau-kalimantan-melambat?fnl=id>
- Mongabay 2016, *Bentang Lahan Gambut: Kebakaran dan Sejarah Tata Kelolanya di Indonesia*, diakses pada 30 Agustus 2019, <https://www.mongabay.co.id/2016/08/26/bentang-lahan-gambut-kebakaran-dan-sejarah-tata-kelolanya-di-indonesia/>
- Osaki, M & Tsuji, N (eds.) 2016, *Tropical Peatland Ecosystems*, Springer: Japan.
- Page, SE, Rieley, JO, Banks, CJ 2011, *Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool*. *Glob Chang Biol* 17:798–818.
- Rocheleau et al. 1996, *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*, Routledge, New York.
- Sundberg, J 2017, Feminist Political Ecology. In *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology* (eds D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu and R. A. Marston).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH

JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminism dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>

7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

